SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 110 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RENJA PD

Pasal 2

Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat;

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
e. Penutup; dan
f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan digunakan PD untuk melaksanakan Rencana Kerja PD;

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan PD;
   b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD;
   c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
   d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 5

(1) Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA PD.

(2) Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra PD Tahun 2021-2026.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;

a. Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
b. Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD; dan

d. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja PD.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja PD.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja PD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.
(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.
(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/ atau perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitan dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.

(3) Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10

(1) Renja PD dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 9; dan
   c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan sasaran PD beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra PD Tahun 2021-2026.

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 110

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001



PERATURAN BUPATI BANDUNG

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang

didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.

13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Keluaran *(output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
19. Hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat; Latar belakang dan

Dasar Hukum, hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran PD, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, dan penutup serta lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan digunakan PD untuk melaksanakan Rencana Kerja PD;

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan PD;
   b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD;
   c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
   d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 5

(1) Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD.

(2) Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perbup tentang Renstra PD Tahun 2021-2026.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;

a. Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
b. Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD; dan
d. Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja PD.

Pasal 7

(1) PD membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja PD.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja PD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.
(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.
(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/ atau perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitan dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.
(3) Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10

(1) Renja PD dapat diubah apabila :
    a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
    b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 9; dan
    c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan sasaran PD beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra PD Tahun 2021-2026.
(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
    a. pagu anggaran program;
    b. kegiatan dan sub kegiatan;

c. perubahan target indikator kinerja program; dan
d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jln. Raya Soreang KM. 17 Telp./Fax (022) 85872591 Soreang 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, *E-mail : bpbdkabbandung@gmail.com*
http://bpbd-kabbandung.blogspot.com

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 000.7.2/Kep.061/BPBD/2024
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah merupakan hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumberdaya yang akan digunakan serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya kebencanaan ;

b. bahwa agar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel rencana kerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan RENJA;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025, yang terdiri dari ketua tim, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; pasal 18 ayat(6);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat(Berita Negara Tahun 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

17. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
18. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
19. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023

tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 133 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;
30. Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/Kep.107-Bappelitbangda/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;

KETIGA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung bertugas menghimpun bahan-bahan dan menyusun Rencana Kerja (RENJA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Soreang
Pada tanggal, 13 Januari 2024
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung

Drs. UKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670914 199501 1 001

Tembusan Yth :
1. Bapak Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kabupaten Bandung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung

Nomor : 000.7.2/Kep.061/BPBD/2024

Tanggal : 13 Januari 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025

Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja
Badan penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung
Tahun 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Pelaksana BPBD	Pembina
2.	Sekretaris BPBD	Ketua Tim
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
5.	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
6.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota
9.	Non PNS	Operator

ditetapkan di Soreang
Pada tanggal, 13 Januari 2024
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung

Drs. UKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670914 199501 1 001

KATA PENGANTAR



Kabupaten Bandung yang memiliki kondisi geografis berupa dataran tinggi berbentuk cekungan dikombinasikan dengan banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi dapat menyebabkan tingginya sedimentasi dan bencana banjir. Kabupaten Bandung juga berisiko mengalami bencana lainnya antara lain gempa bumi, gerakan tanah, longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan dan wabah penyakit lain seiring terjadinya bencana.

Penanganan penanggulangan bencana terdapat pada beberapa tahapan diantaranya pencegahan dan kesiapsiagaan, penanggulangan kedaruratan pada saat kejadian dan penanganan penanggulangan pada paska bencana, hal ini sudah menjadi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

Tugas pokok dan fungsi tersebut selain dari aspek teknis operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya tidak terlepas dari aspek perencanaan. BPBD untuk melaksanakan penyusunan Dokumen perencanan yang mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah. Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan OPD, tahap penyusunan renja OPD, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Untuk mewujudkan *good governance*, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2025 bermaksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dengan dukungan sumber pembiayaan/anggaran terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Melalui Rencana Kerja ini, diharapkan BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diselenggarakan secara optimal serta dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, masyarakat maupun swasta yang membutuhkannya.

Soreang, 16 Juli 2024

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bandung

Drs. H. Uka Suska Puji Utama, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670914 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-4

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD 2023 ..... II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD II-18

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan FungsiI II-23

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Kab. Bandung II-30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-49

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD III-3

3.3 Program dan Kegiatan III-9

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD IV-1

BAB V PENUTUP

5.1 Penutup V-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 ..... II-2
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Kab. Bandung Tahun Anggaran 2023 ..... II-3
Tabel 2.3 T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021-2026 Kab. Bandung II-9
Tabel 2.4 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kab. Bandung II-19
Tabel 2.5 Capaian SPM 2023 ..... II-20
Tabel 2.6 Hasil Capaian SDGS II-21
Tabel 2.7 Capaian (Laporan) dan Program SDGS II-22
Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Kunci IKK II-23
Tabel 2.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD II-27
Tabel 2.10 T-C.31 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023 Kab. Bandung II-32
Tabel 2.11 T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kab. Bandung II-49
Tabel 3.1 Tabel Tujuan dan Sasaran BPBD Kab. Bandung III-3
Tabel 3.2 T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 ..... III-10
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Tahun 2025 Kab. Bandung IV-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Profil Demografi Pegawai BPBD Tahun 2024 ..... II-25
Gambar 2.2 Pegawai BPBD Kab. Bandung Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2024 ..... II-25
Gambar 2.3 Pegawai BPBD yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural II-26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung tahun 2025 telah di tetapkan melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2024, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Awal Renja PD yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah..

Dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Hal ini juga untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Penyusunan Dokumen Renja ini, BPBD melakukan pemetaan dari Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.151.1317/2023 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan terkait serta hasil identifkasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan focus dan arah gerak Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bekerja menuntaskan isu isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung adalah melaksanakan misi ke-3 (Ketiga) yaitu **“3. Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan”.**

Untuk mendukung misi ini, aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen yang perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencana. Meninjau historis kebelakang, beberapa bencana cenderung tidak dapat dihindarkan dan mengganggu stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan terjadinya bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi perlu pula untuk diarahkan pada upaya adaptasi berupa rekayasa infrastruktur dan fasilitas publik agar memiliki kepentingan terhadap bencana.

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; pasal 18 ayat(6);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
16. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;

18. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.151.1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perrubahan atasa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 20021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 133 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Dokumen Renja BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi BPBD Kabupaten Bandung pada tahun 2025 serta terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penanganan penanggulangan kebencanaan di wilayah Kabupaten Bandung

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bancana Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025;
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan dari penjabaran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025;
3. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;

4. Sebagai pedoman / arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rancangan Renja PD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan

dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu



Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bandung merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Bandung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bandung selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung beserta target dan capaian realisasinya. Hasil sebagaimana tersebut diatas, dapat kami sampaikan dan jelaskan berdasarkan indikator kegiatan yang terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	Target	Realisasi	Capaian (Persentase)
1	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penangulangan bencana	1. Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,56	0,56	100
			2. Persentase peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat yang terkena dampak bencana	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Keterntraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1 Nilai SAKIP	72	77,60	107,77
			2 Nilai IKM	77	83,43	108,18
			3. Pesentase BMD Kondisi Baik	80	48,64	60,80

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

1. Evaluasi Program Tahun 2023

Anggaran BPBD pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. **14.806.965.229** (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) terealisasi sebesar Rp. **12.945.539.425** (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau pencapaian **87.43%,** dengan rincian belanja sebagai berikut :

a) **Belanja Operasi** sebesar Rp**. 14.199.121.740** (empat belas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp **12.340.707.169** (dua belas milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh ribu seratus enam puluh Sembilan Rupiah) atau pencapaian **86,91%;**

b) **Belanja Modal** sebesar Rp. **607.843.489** (enam ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. **604.832.256** (enam ratus empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam Rupiah) atau pencapaian **99.45%.**

Adapun untuk anggaran realisasi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD kabupaten Bandung, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran Rp
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**- Nilai SAKIP - Nilai IKM Persentase Aset BMD dalam kondisi baik**	**10.912.496.743**	**9.336.037.729**	**85,55**	**1.576.459.014**
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**67.540.000**	**60.996.160**	**90,31**	**6.543.840**
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	17.440.123	87,20	2.559.877
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.992.000	14.543.894	90,94	1.448.106
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.420.000	2.100.000	86,78	320.000
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.128.000	26.912.143	92,39	2.215.857
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan**	**Persentase Dokumen pelaksanaan**	**7.068.756.743**	**5.688.479.903**	**80,47**	**1.380.276.840**

Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran Rp
	Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan yang tepat waktu**				
1.05.01.2.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.058.756.743	5.678.751.903	80,45	1.380.004.840
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.728.000	97,28	272.000
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**	**40.000.000**	**39.655.000**	**99,14**	**345.000**
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40.000.000	39.655.000	99,14	345.000
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**455.266.800**	**357.469.459**	**78,52**	**97.797.341**
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20.000.000	19.782.000	98,91	218.000
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50.000.000	49.598.400	99,20	401.600
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.300.000	2.821.420	85,50	478.580
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.056.800	9.295.400	92,43	761.400
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21.700.000	21.144.400	97,44	555.600
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10.900.000	6.000.000	55,05	4.900.000
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	35.000.000	34.685.000	99,10	315.000

Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran Rp
		Tamu				
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.310.000	214.142.839	70,37	90.167.161
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**244.410.000**	**221.565.468**	**90,65**	**22.844.532**
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	235.440.000	214.000.000	90,89	21.440.000
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8.970.000	7.565.468	84,34	1.404.532
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.548.877.030**	**2.499.082.189**	**98,05**	**49.794.841**
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000	4.590.000	80,53	1.110.000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	105.477.030	80.894.789	76,69	24.582.241
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.437.700.000	2.413.597.400	99,01	24.102.600
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**	**487.646.170**	**468.789.550**	**96,13**	**18.856.620**
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13.750.000	12.104.560	88,03	1.645.440
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	165.340.000	152.948.940	92,51	12.391.060

Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran Rp
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.000.000	0	0,00	1.000.000
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56.800.000	54.100.000	95,25	2.700.000
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	250.756.170	249.636.050	99,55	1.120.120
1.05.03	**Program Penanggulangan Bencana**	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	**3.894.468.486**	**3.609.501.696**	**92,68**	**284.966.790**
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**260.485.506**	**225.621.552**	**86,62**	**34.863.954**
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	5.240.000	2.025.000	38,65	3.215.000
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	255.245.506	223.596.552	80.67	31.648.954
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**1.666.624.280**	**1.529.202.425**	**91,75**	**137.421.855**
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	493.500.000	465.089.000	94,24	28.411.000
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan	516.000.000	477.141.275	92,47	38.858.725

Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran Rp
		dan Mitigasi Bencana				
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	178.395.750	89,20	21.604.250
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	150.000.000	129.840.000	86,56	20.160.000
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	307.124.280	278.736.400	90,76	28.387.880
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	0	0	0,00	0
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	0	0	0,00	0
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.327.358.700**	**1.288.392.420**	**97,06**	**38.966.280**
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	10.000.000	7.782.000	77,82	2.218.000
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	-SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	366.158.700	354.176.188	96,73	11.982.512
		- Persentase penanganan bencana non alam epidemi/wabah penyakit				
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis	243.200.000	238.669.418	98,14	4.530.582

Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran Rp
	Kabupaten/Kota	Kejadian Bencana				
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	688.000.000	678.246.814	98,58	9.753.186
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	10.000.000	7.558.000	75,58	2.442.000
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	- SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	10.000.000	1.960.000	19,60	8.040.000
		-Persentase penanganan bencana non alam epidemi/wabah penyakit				
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan**	**640.000.000**	**566.285.299**	**88,48**	**73.714.701**
1.05.03.2.04.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	640.000.000	566.285.299	88,48	73.714.701
		Program 1	**10.912.496.743**	**9.336.037.729**	**85,55**	**1.576.459.014**
		Program 2	**3.894.468.486**	**3.609.501.696**	**92,68**	**284.966.790**
		Program 1 + 2	**14.806.965.229**	**12.945.539.425**	**87,43**	**1.861.425.804**

Pada Tabel diatas dievaluasi dalam bentuk realisasi anggaran. Selanjutnya, pada **Tabel T-C.29** menjelaskan capaian akuntabilitas kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.3

T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021-2026

Kabupaten Bandung

Nama PD : BPBD

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP Nilai IKM**	**Nilai Nilai**	**80 76**	**Nilai Nilai**	**70 81,65**	**Poin**	**- 70 - 75**	**Poin**	**- 75,45 - 80,04**	**- 107.79 - 105.31**	**Nilai Nilai**	**77 72**	**Nilai Nilai**	**- 222.45 - 233.69**	**- 289.03 - 324.56**
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**300**	300,00
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	100	Dokumen	2	Dokumen	6	60,00
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	100	Dokumen	2	Dokumen	6	60,00
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	100	Dokumen	2	Dokumen	6	60,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	10	Dokumen	6	Dokumen	2	Dokumen	2	100	Dokumen	2	Dokumen	10	100,00
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**300**	300,00
1.05.01.2.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	108	Bulan	12	Bulan	14	Bulan	14	100	Orang/ Bulan	27	Orang/ Bulan	53	49,07
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	Dokumen	2	dokumen	5	dokumen	5	100	Laporan	3	Laporan	10	83,33
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**300**	300,00
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100	Stell	80	Stell	80	Stell	80	100	Paket	100	Paket	260	260,00
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi**	**Persen**	**100**	**Persen**	**70,16**	**Persen**	**100**	**Persen**	**80,4**	**80,4**	**Persen**	**100**	**Persen**	**180**	180,40

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Umum Kantor														
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	Jenis	14	Jenis	13	Jenis	11	84,615384 62	Paket	15	Paket	40	66,67
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40	Unit	11	Unit	8	Unit	8	100	Paket	8	Paket	27	67,50
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25	Jenis	15	jenis	5	jenis	5	100	Paket	5	Paket	25	100,00
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	N/A	N/A	jenis	6	jenis	6	100	Paket	1	Paket	7	175,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	Jenis	6	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Paket	6	Paket	12	40,00
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	20	Jenis	4	jenis	4	jenis	2	50	Dokumen	4	Dokumen	10	50,00
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	HOK	457	HOK	500	HOK	400	80	Laporan	1	Laporan	858	21.450,00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	HOK	400	HOK	250	HOK	200	80	Laporan	1	Laporan	601	15.025,00
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Persen**	**100**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**#VALUE!**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	100,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Urusan Pemerintah Daerah														
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Unit	1	Unit	1	#DIV/0!
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Unit	1	Unit	1	#DIV/0!
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**Persen**	**39,96**	**Persen**	**100**	**Persen**	**85,68**	**85,68**	**Persen**	**100**	**Persen**	**226**	225,64
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	Buah	3525	Buah	4.500	Buah	4.889	108,6444444	Laporan	1	Laporan	8.415	210.375,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	100	Laporan	1	Laporan	25	625,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	OB	1471	OB	1416	OB	1416	100	Laporan	1	Laporan	2.888	72.200,00
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**100**	**Persen**	**47,13**	**Persen**	**100**	**Persen**	**55,55**	**55,55**	**Persen**	**100**	**Persen**	**203**	202,68
1.05.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	70	Kali	125	Unit	14	Unit	11	78,57142857	Unit	14	Unit	150	214,29
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	115	kali	35	Unit	19	Unit	9	47,36842105	Unit	23	Unit	67	58,26

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya														
1.05.01.2.09.02	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Unit	1	-	1	25,00
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	Kali	9	Jenis	2	Jenis	2	100	Unit	2	Unit	13	130,00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah jenis Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	25	Kali	19	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	-	0	Kali	19	76,00
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	100	Unit	1	Unit	3	60,00
1.05.03	**Program Penanggulangan Bencana**	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**300**	300,00
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**Orang**	#####	**Orang**	**667,569**	**Orang**	**386.272**	**Orang**	**386.272**	**100**	**Orang**	**750.000**	**Orang**	**1.136.940**	37,28
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	**Persen**	100	Persen	100	Persen	0	0	Dokumen	1	Dokumen	101	10.100,00
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada	Orang	3.050.000	**Persen**	100	Persen	100	Persen	100	100	Orang	750.000	Orang	750.200	24,60

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya														
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Orang**	**1.050.0000**	**Orang**	**269,522**	**Orang**	**356.146**	**Orang**	**356.146**	**100**	**Orang**	**700.000**	**Orang**	**1.056.416**	37,07
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	480	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Orang	120	Orang	120	25,00
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	4	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Dokumen	1	Dokumen	201	5.025,00
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Unit	3	Unit	3	25,00
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa tangguh bencana	Kawasan	4	Desa	3	Desa	2	Desa	2	100	N/A	N/A	Desa	5	125,00
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi	Jumlah Personil TRC yang	Orang	600	Orang	100	Orang	150	Orang	150	100	Orang	150	Orang	400	66,67

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya														
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	800	Orang	200	Persen	100	Persen	100	100	Orang	200	Orang	500	62,50
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Dokumen	1	Dokumen	0	#DIV/0!
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Orang**	**1.050.000**	**Orang**	**217,192**	**Orang**	**49.819**	**Orang**	**49.819**	**100**	**Orang**	**250.000**	**Orang**	**300.036**	28,57
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Laporan	0	Laporan	0	#DIV/0!
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	- SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Dokumen	1	Dokumen	0	0,00
		- Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	300	300,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	400.000	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Orang	100.000	Orang	100.200	25,05
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	400.000	Jenis	5	Jenis	6	Jenis	6	100	Orang	100.000	Orang	100.011	25,00
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Laporan	0	-	0	#DIV/0!
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	- SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Dokumen	0	-	0	#DIV/0!
		- Persentase penanganan bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Persen	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Persen	0	-	0	#DIV/0!
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**Persen**	**100**	**0**	**300**	300,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	16	Orang	25000	Orang	304.817	Orang	304.817	100	Dokumen	4	Orang	329.821	2.061.381,25

Berdasarkan hasil evaluasi secara umum permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat kewilayahan, daerah perbatasan, kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat;
c. Belum optimalnya penyusunan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana (RKPB dan Rencana Kontijensi) di wilayah Kabupaten Bandung;
d. Kurang terpenuhinya data dukung berkenaan dengan data potensi bencana perwilayah, rekapitulasi kejadian bencana yang disertai kerugian material dan non material;
e. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada pergeseran di perubahan anggaran hal ini dikarenakan adanya refocusing Crosscutting;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.2 Analisis kinerja Pelayanan BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dibentuk terakhir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 133 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dipimpin oleh seorang Ex Officio adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggara tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.4
T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bandung

NO	INDIKATOR	SPM	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -			REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		Proyeksi		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1.	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)		0.56	0.58	0.56	0.52	0.56	0.56	0.58	
	Persentase peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat yang terkena dampak bencana	1. Pelayanan informasi rawan bencana 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Nilai IKM		81	78	79	80,04	83,43	81	80	
	Nilai SAKIP		85,5	74	78	75,45	77,60	78	74	
	Persentase BMD Kondisi Baik		80%	90%	900%	99,9 %	60%	80%	90%	

Tabel 2.5
CAPAIAN SPM 2023

PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA							
Penerima Layanan Dasar				Mutu Pelayanan Dasar			
Indikator	Target	Capaian	%	Indikator	Target	Capaian	%
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	250	250	100	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	2.164	2.164	100
				Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub- urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	4.78	4.78	100

PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA							
Penerima Layanan Dasar				Mutu Pelayanan Dasar			
Indikator	Target	Capaian	%	Indikator	Target	Capaian	%
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	170	170	100	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	100
				Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	170	170	100
				Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	100	100	100
				Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	100	100	100
				Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	1000	1000	100

Realisasi ketiga pelayanan dasar pada SPM Urusan Trantibumlinmas diatas telah mencapai target 100% di tahun 2023. Meskipun begitu masih terdapat beberapa kendala yang perlu dibenahi sehingga dapat memberikan pelayanan optimal secara berkelanjutan. Adapun permasalahan yang perlu dibenahi diantaranya permasalahan SDM, anggaran, kelembagaan, regulasi, operasional, hingga sarana dan prasarana.

PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA							
Penerima Layanan Dasar				Mutu Pelayanan Dasar			
Indikator	Target	Capaian	%	Indikator	Target	Capaian	%
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	500	500	100	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	100
				Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1	1	100
				Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	500.000	500.000	100
				Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	17	17	100

Di tahun 2023, realisasi Pelayanan Informasi Rawan Bancana telah mencapai target 100%. Meskipun begitu masih terdapat beberapa kendala yang perlu dibenahi sehingga dapat memberikan pelayanan optimal secara berkelanjutan. Adapun permasalahan yang perlu dibenahi diantaranya permasalahan SDM, anggaran, kelembagaan, regulasi, operasional, hingga sarana dan prasarana.

Tabel 2.6
Hasil Capaian SDGS

No	Sasaran Global		Sasaran Nasional (PERPRES No 59 Tahun 2017)		Sasaran Nasional (PERPRES No 111 Tahun 2021)		Indikator Metadata 1		Indikator Proxy	Satuan Data Target	Target RPJMD 2023	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Status Capaian 2023	Perangkat Daerah	Catatan	Ket.
5	1, 5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan,dan menurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	–	–	4, 4	Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana danpasca bencana sebanyak 55dokumen. Tahun dasar 2020: 246 dokumen (Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana).	1.5.3 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	–	Dokumen	**2**	Dokumen	**1**	**2**	Tercapai	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Hasil capaiany a sama dengan yang diperoleh di tahun 2022	

Tabel 2.7
Capaian (Laporan) dan Program SDGS

TPB 11 : KOTA DAN KOMUNITAS BERKELANJUTAN (Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan)

No	Indikator Metadata 1		Satuan Data Target	Target RPJMD 2023	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Status Capaian 2023	Perangkat Daerah	
2	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang/ 100.000	**0,00**	**0,00**	**N/A**	**0,00**	Tercapai	BPBD	Meninggal
			Orang/ 100.000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			Hilang
			Orang/ 100.000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			Terluka
			Orang/ 100.000	**0,00**	**5924**	**N/A**	**690**			Mengungsi

TPB 11 : KOTA DAN KOMUNITAS BERKELANJUTAN (Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan)

No	Sasaran Global		Indikator Metadata 1		Program (RKPD 2023)	Kegiatan (RKPD 2023)	Sub Kegiatan (RKPD 2023)	Perangkat Daerah
2	11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
							Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
							Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
							Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
							Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	

Tabel 2.8

Capaian Indikator Kinerja Kunci IKK

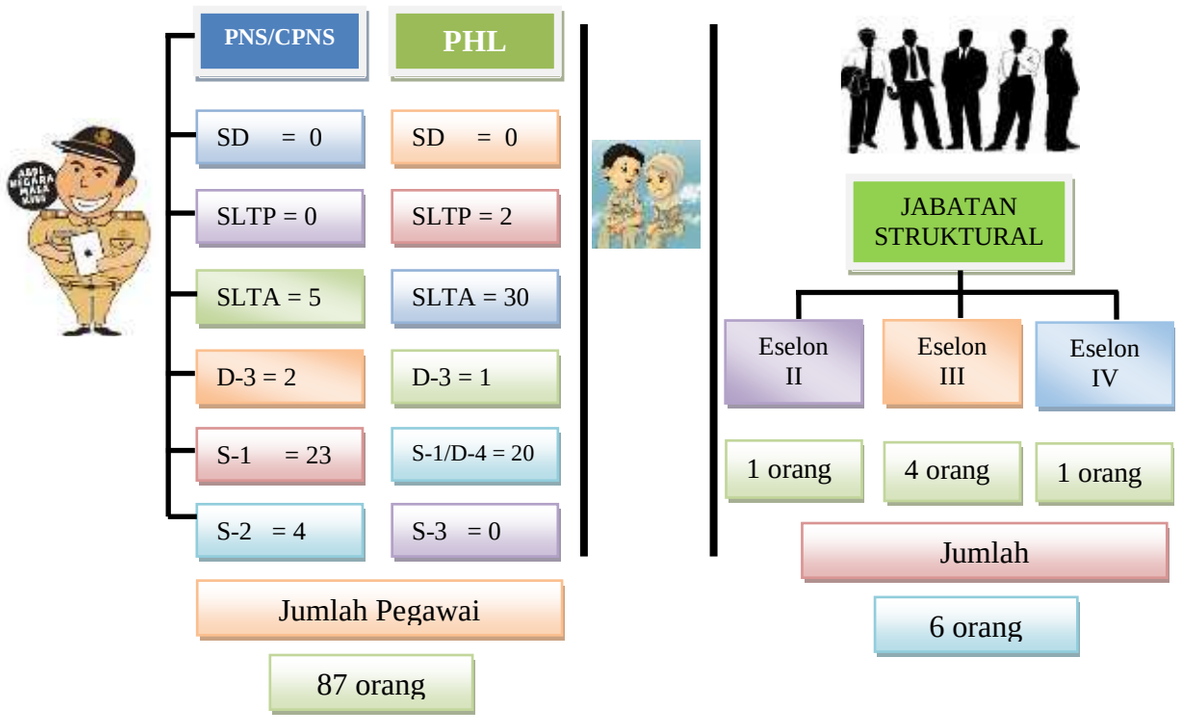
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 479,860+808,718	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. 2 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan X100	1.506.013
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal 1 Dokumen 2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal Suket 3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 4780 4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan612 5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana0 6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan mitigasi 2163	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana . 2 Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana X100	1.058.718

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB suket 2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 4 SK TD 3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 82 orang 4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana 808,718	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 2 Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana X100	808.718

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Tugas, Pokok dan Fungsi BPBD

Sejak dibentuk pada tahun 2010 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 133 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

Gambar 2.1
PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI
BPBD TAHUN 2024



Dilihat dari ***Gambar 2.3.1*** Profil Demografi Pegawai diatas berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai BPBD Kabupaten Bandung sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di dalam menentukan tugas-tugas kebencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan sebagaimana di atas.

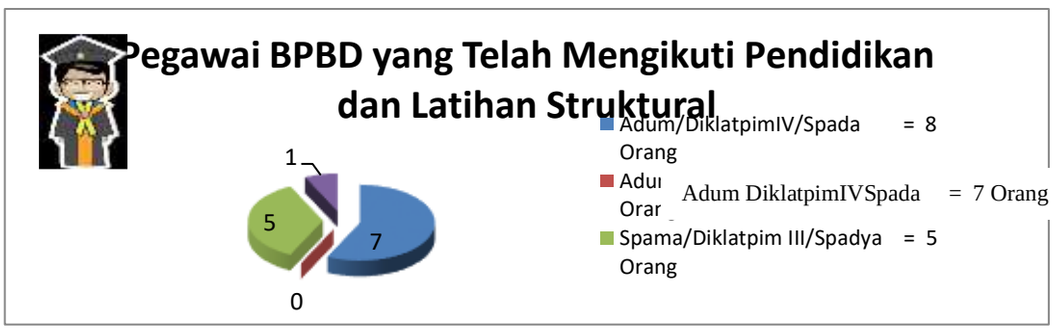
Gambar 2.2
Pegawai BPBD Kabupaten Bandung
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2024



Berdasarkan ***Gambar 2.3.2***, pegawai BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas, Golongan II sebanyak 22 %, Golongan III sebanyak 52% dan Golongan IV sebanyak 26%, melihat komposisi tersebut, pegawai BPBD banyak ditempati oleh golongan II Dan III, dilain sisi BPBD memerlukan tambahan pegawai Golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor dalam hal ini Jabatan Fungsional Umum (JFU) ataupun Jabatan Fungsional Teknis (JFT) dari PNS atau PPPK.

Di samping pendidikan formal, pegawai BPBD juga telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3



Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana
b. Sekretariat, membawahkan
    a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub. Bagian Keuangan
    c. Sub. Bagian Penyusunan Program
c. Bidang Kedaruratan dan Logistik
d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
f. Jabatan Fungsional, sebagai berikut:
    - Perencana
    - Analis Keuangan Pusat dan Daerah
    - Penata Penanggulangan Bencana
    - Analis Kebencanaan
    - Arsiparis Terampil

Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung adalah:

TABEL 2.9

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan BPBD
			Internal (kewenangan BPBD)	Eksternal (diluar kewenangan BPBD)	
1. Sumber Daya Manusia	Implementasi rencana kerja BPBD belum optimal	Rasio Jumlah Personil dengan Pelayanan Publik di Bidang Kebencanaan	Masih dalam proses adaptasi dengan tupoksi baru	Kuota perekrutan Aparatur terbatas	kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dibidang Penanggulangan Bencana
2. Sumber Daya Anggaran	Baru terpenuhinya kebutuhan Pendanaan/Anggaran Sektoral BPBD	Perda APBD tentang Rasio Pagu Anggaran Kebencanaan dari Total APBD	Rancangan Kebutuhan Pagu Anggaran yang proporsional	Regulasi/Kebijakan Pagu Anggaran APBD	Belum optimalnya Pagu Anggaran Sektoral BPBD
3. Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas kurang memadai	Permendagri No 7 Tahun (standarisasi sarana prasarana pemerintah)	Belum lengkapnya Rescue KIT	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
4. Pengurangan resiko bencana (mitigasi)	Belum optimalnya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan Rencana Kontijensi	Dokumen Perencanaan Untuk jangka waktu tertentu	Pembuatan RPB dan Rencana Kontijensi masih dalam proses	Perda/Perbup tentang RAD, PRB dan Rencana Kontijensi belum terbit	Belum optimalnya kualitas Sistem Manajemen PRB yg didukung oleh RAD, PRB dan Rencana Kontijensi
5. Pemetaan daerah rawan bencana	Peta daerah rawan bencana belum tersosialisasikan ke seluruh swilayah kecamatan	Dana/Anggaran	Keterbatasan anggaran sosialisasi wilayah rawan bencana	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya sosialisasi potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan BPBD
			Internal (kewenangan BPBD)	Eksternal (diluar kewenangan BPBD)	
6. Pengembangan partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana	Belum optimalnya peranan Unit Cegah Siaga, Tim Reaksi Cepat dan Forum yang menampung aspirasi masyarakat dalam PB	Pencegahan/ Siaga dan Adaptasi	Terbatasnya ketersediaan Anggaran dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam PB	Belum terbitnya Perda Penanggulangan Bencana	Belum optimalnya peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikoordinir oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana
7. Peningkatan/Pengoptimalan Koordinasi lintas SKPD terkait Penanggulangan Bencana dari Aspek Kewenangan/Tupoksi, Penganggaran, Program dan Kegiatan	Belum Optimatnya Pelaksanaan kualitas Koordinasi Lintas SKPD terkait Penanggulangan Kebencanaan.	Kegiatan Sosialisasi dan Rapat Kerja	Fungsi Komando /memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana	Persepsi dan Intepretasi SKPD terhadap Penangguala ngan Bencana belum sama dan sejalan.	Belum Optimalnya Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana baik lintas lembaga/intansi/SKPD, lintas program/kegiatan maupun Anggaran
8. Penanganan Siklus Manajemen Penanggulangan Bencana	Belum Optimalnya Pelayanan Penanggulangan Bencana pada saat Pra, Saat dan Pasca Bencana.	SPM (Standar Pelayanan Minimal) Penanggulangan Kebencanaan	SPM/SOP dalam Proses	Regulasi/Kebijakan SPM/SOP dari Pemerintah Pusat belum terbit	Belum adanya Pedoman/Acuan yang dilandasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
9. Kajian Resiko Becana (KRB)	Belum Optimalnya Kegiatan KRB	Dokumen Kajian	Kewenangan dan Tupoksi	Anggaran dan SDM	Belum adanya Kajian yang Komprehensif terhadap gambaran secara menyeluruhterhadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan BPBD
			Internal (kewenangan BPBD)	Eksternal (diluar kewenangan BPBD)	
					ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah/Kabupaten Bandung dalam bentuk tertulis dan Peta
10. Sistem Penanganan Darurat Bencana	Terbentuknya Pusdalops dan Gis	SDM dan IPTEK	Tupoksi dan SDM	Peningkatan Anggaran untuk pengembngan SDM berupa Diklat/Bintek	Belum Optimalnya Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Pemasalahan dalam penanggulangan bencana berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung terutama misi ketiga. Perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (siaga bencana) berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan. Siaga bencana merupakan tujuan dari peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tindakan untuk selalu menjaga lingkungan terutama di daerah rawan bencana. Pembangunan infrastruktur tidak bisa dilaksanakan oleh BPBD tetapi merupakan kegiatan multisektor sehingga perlu dibangun sebuah komitmen bersama penanggulangan bencana antar PD dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Bandung.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana memberikan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tantangan dan peluang tersebut yaitu:

1) Penanggulangan bencana yang sudah terstruktur dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah memudahkan komando dan koordinasi antar dan lintas instansi pemerintah sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan pelayanan kebencanaan.

2) Perubahan paradigma penanggulangan bencana berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan terkait penanggaran dan pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan yang harus selalu siap digunakan ketika terjadi darurat bencana.

3) Keterlibatan pihak swasta baik lokal maupun asing dalam penanggulangan bencana menuntut pemerintah daerah untuk selalu mengawasi dan mengendalikan proses bantuan baik dalam penerimaan maupun penyalurannya.

Rekomendasi Strategis Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung:

1) Perlu adanya kejelasan payung hukum dari pemerintah pusat yang mengatur tentang alokasi dana kontinjensi dan dana siap pakai dalam APBD karena keberadaannya telah diamanatkan dalam PP Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

2) Perlunya penguatan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

3) Perlu adanya sinkronisasi dalam membuat peraturan perundangan-undangan yang harus dilaksanakan di daerah dengan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakan atau diimplementasikan kepada masyarakat.

4) Kelembagaan penanggulangan bencana harus dapat bertindak lintas sektor dan lintas wilayah serta memiliki rantai komando yang jelas dan efektif.

2.4 Review Terhadap rancangan RKPD Kabupaten Bandung

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada RPJMP dan RPJMD Kabupaten Bandung. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, penanggulangan bencana belum menjadi kebijakan utuh pemerintah Kabupaten Bandung karena masih menjadi bagian dalam kebijakan pengelolaan lingkungan. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen pemerintah Kabupaten Bandung terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bandung untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung, BPBD yang baru terbentuk lima tahun membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan secara internal maupun ekternal. Secara internal, masih banyak kebutuhan peralatan kebencanaan terutama

alat-alat evakuasi yang memiliki kualitas bagus dan sebuah manajemen gudang logistik yang representatif untuk menyimpan dan mengelola peralatan tersebut. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur BPBD yang siap siaga bencana melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh BPBD sendiri maupun oleh instansi kebencanaan lain yang kompeten. Secara ekternal, penguatan kelembagaan BPBD harus menjadi prioritas untuk menunjang tiga fungsi BPBD yaitu fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Penguatan kelembagaan BPBD harus melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat penanggulangan bencana seperti Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Badan Keuangan Daerah (BKD) , Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) , Dinas Sosial (DINSOS), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan (DINKES), Dinas Pendidikan (DISDIK), Dinas Kebakaran (DISKAR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), SATPOL PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL), Dinas Pertanian (DISTAN), Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (BADAN KESBANGPOL) seluruh kecamatan dan kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung.

Pada Tahun Perencanaan 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung merumuskan Program dan Kegiatan sebagaimana dapat dilihat dari tabel **T-C.31** berikut.

Tabel 2.10
T-C.31
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Bandung

Nama PD : BPBD

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kabupaten Bandung**	**Nilai IKM Nilai SAKIP**	**78 74**	**Rp 10,037,103,000.00**	**X**	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kabupaten Bandung**	**Nilai IKM Nilai SAKIP**	**78 74**	**Rp 10,037,103,000.00**
X	**XX**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase pemenuhan proses perencanaan**	**100 Persen**	**Rp 70,000,000.00**	**X**	**XX**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase pemenuhan proses perencanaan**	**100 Persen**	**Rp 70,000,000.00**
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 25,000,000.00	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 25,000,000.00
X	XX	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp 10,000,000.00	X	XX	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp 10,000,000.00
X	XX	01	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Kabupaten Bandu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 10,000,000.00	X	XX	01	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Kabupaten Bandu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 10,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
					DPA-SKPD	ng	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								DPA-SKPD	ng	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	Rp 25,000,000.00	X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	Rp 25,000,000.00
X	**XX**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai**	**100 Persen**	**Rp 6,698,323,000.00**	**X**	**XX**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai**	**100 Persen**	**Rp 6,698,323,000.00**

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
							ketentuan										**ketentuan**		
X	XX	01	2.02	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang / Bulan	Rp 6,685,323,000.00	X	XX	01	2.02	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang / Bulan	Rp 6,685,323,000.00
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Rp 13,000,000.00	X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Rp 13,000,000.00
X	**XX**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase Administrasi Kepegawaian**	**100 Persen**	**Rp 50,000,000.00**	**X**	**XX**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase Administrasi Kepegawaian**	**100 Persen**	**Rp 50,000,000.00**
X	XX	01	2.05	07	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	Rp 50,000,000.00	X	XX	01	2.05	07	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	Rp 50,000,000.00
X	**XX**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan**	**100 Persen**	**Rp 670,000,000.00**	**X**	**XX**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan**	**100 Persen**	**Rp 670,000,000.00**

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
							gedung kantor yang layak pakai										**gedung kantor yang layak pakai**		
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Rp 195,000,000.00	X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Rp 195,000,000.00
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp 20,000,000.00	X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp 20,000,000.00
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Rp 20,000,000.00	X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Rp 20,000,000.00
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 10,000,000.00	X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 10,000,000.00
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp 20,000,000.00	X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp 20,000,000.00
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan	Kabupaten	Jumlah Dokumen	4 Doku	Rp 20,000,000.00	X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan	Kabupaten	Jumlah Dokumen	4 Doku	Rp 20,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
					dan Peraturan Perundang-undangan	Bandung	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	men							dan Peraturan Perundang-undangan	Bandung	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	men	
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Rp 35,000,000.00	X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Rp 35,000,000.00
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Rp 350,000,000.00	X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Rp 350,000,000.00
X	**XX**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**Rp 40,000,000.00**	**X**	**XX**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**Rp 40,000,000.00**
X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Rp 10,000,000.00	X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Rp 10,000,000.00
X	X	0	2.	0	Pengadaan	Kabup	Jumlah Unit	1 Unit	Rp	X	X	0	2.	0	Pengadaan	Kabup	Jumlah Unit	1 Unit	Rp

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
	X	2	08	2	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	aten Bandung	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		10,000,000.00		X	2	08	2	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	aten Bandung	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		10,000,000.00
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Rp 10,000,000.00	X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Rp 10,000,000.00
X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp 10,000,000.00	X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp 10,000,000.00
X	**XX**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100 Persen**	**Rp 2,058,780,000.00**	**X**	**XX**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100 Persen**	**Rp 2,058,780,000.00**
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 10,000,000.00	X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 10,000,000.00
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	Rp 112,500,000.00	X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	Rp 112,500,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
							Air dan Listrik yang Disediakan										Air dan Listrik yang Disediakan		
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 1,936,280,000.00	X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 1,936,280,000.00
X	**XX**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase Kpemenuhan Barang Milik Daerah Layak Pakai**	**100 Persen**	**Rp 450,000,000.00**	**X**	**XX**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bandung**	**- Persentase Kpemenuhan Barang Milik Daerah Layak Pakai**	**100 Persen**	**Rp 450,000,000.00**
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 100,000,000.00	X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 100,000,000.00
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	37 Unit	Rp 70,000,000.00	X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	37 Unit	Rp 70,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
X	XX	00	2.08	05	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Rp 10,000,000.00	X	XX	00	2.08	05	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Rp 10,000,000.00
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Rp 20,000,000.00	X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Rp 20,000,000.00
X	XX	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Rp 50,000,000.00	X	XX	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Rp 50,000,000.00
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 200,000,000.00	X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 200,000,000.00
					Jumlah Program 1				**Rp 10,037,103,000.00**						**Jumlah Program 1**				**Rp 10,037,103,000.00**
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	**100%**	**Rp 5,877,241,000.00**	**1**	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Kabupaten Bandung**	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	**100%**	**Rp 5,877,241,000.00**
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah Warga Negara yang**	**750000 Orang**	**Rp 410,000,000.00**	**1**	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah Warga Negara yang**	**750000 Orang**	**Rp 410,000,000.00**

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
					Kabupaten/Kota		**memperoleh layanan informasi rawan bencana**								**Kabupaten/Kota**		**memperoleh layanan informasi rawan bencana**		
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	750000 Orang	Rp 400,000,000.00	1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	750000 Orang	Rp 400,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**700000 Orang**	**Rp 2,643,000,000.00**	**1**	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**700000 Orang**	**Rp 2,643,000,000.00**
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	120 Orang	Rp 300,000,000.00	1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	120 Orang	Rp 300,000,000.00
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kot	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaa	1 Dokumen	Rp 700,000,000.00	1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kot	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaa	1 Dokumen	Rp 700,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
					a		n Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								a		n Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	3 Unit	Rp 300,000,000.00	1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	3 Unit	Rp 300,000,000.00
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kabupaten Bandung	- Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan KapasitasnyadalamPencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	- 1 Kawasan - 1 Kali	Rp 400,000,000.00	1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kabupaten Bandung	- Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan KapasitasnyadalamPencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	- 1 Kawasan - 1 Kali	Rp 400,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
							- Jumlah Kegiatan Stabilisasi Lereng/penahan tanah										- Jumlah Kegiatan Stabilisasi Lereng/penahan tanah		
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	150 Orang	Rp 463,000,000.00	1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	150 Orang	Rp 463,000,000.00
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Rp 200,000,000.00	1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Rp 200,000,000.00
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 Orang	Rp 250,000,000.00	1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 Orang	Rp 250,000,000.00
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	0 Dokumen	Rp 10,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
1	05	03	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	Rp -	1	05	03	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	Rp -
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**250000 Orang**	**Rp 1,655,000,000.00**	**1**	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**250000 Orang**	**Rp 1,655,000,000.00**
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0 Laporan	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0 Laporan	Rp 10,000,000.00
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama	- 1 Dokumen - 100%	Rp 350,000,000.00	1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama	- 1 Dokumen - 100%	Rp 350,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
							1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat										1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100000 Orang	Rp 200,000,000.00	1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100000 Orang	Rp 200,000,000.00
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100000 Orang	Rp 1,075,000,000.00	1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100000 Orang	Rp 1,075,000,000.00
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0 Laporan	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0 Laporan	Rp 10,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kabupaten Bandung	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	- 0 Dokumen - 0%	Rp 10,000,000.00	1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kabupaten Bandung	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	- 0 Dokumen - 0%	Rp 10,000,000.00
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan**	**100%**	**Rp 1,169,241,000.00**	**1**	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Kabupaten Bandung**	**persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan**	**100%**	**Rp 1,169,241,000.00**
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0 Dokumen	10,000,000	1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0 Dokumen	10,000,000

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu (Rp)
							di Daerah										di Daerah		
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0 Dokumen	10,000,000	1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0 Dokumen	10,000,000
1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0 Dokumen	10,000,000	1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0 Dokumen	10,000,000
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	0 Dokumen	10,000,000	1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	0 Dokumen	10,000,000
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0 Laporan	10,000,000	1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0 Laporan	10,000,000
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui	4 Dokumen	Rp 1,119,241,000.00	1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui	4 Dokumen	Rp 1,119,241,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**						**Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu (Rp)**
							Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)								Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				
					Jumlah Program 2				**Rp 5,877,241,000.00**						**Jumlah Program 2**				**Rp 5,877,241,000.00**
					Jumlah Program 1+2				**Rp 15,914,344,000.00**						**Jumlah Program 1+2**				**Rp 15,914,344,000.00**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung berasaskan lima prinsip yaitu perencanaan **politik**, perencanaan **teknokratik**, perencanaan **partisipatif**, perencanaan ***top down***, dan perencanaan ***bottom up***. Musrenbang Kabupaten Bandung tahun 2024 merupakan bagian dari perencanaan partisipatif, perencanaan ***top down*** dan perencanaan ***bottomup*** yang dimulai dari tingkat desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Namun demikian sejak tahun anggaran 2017 pada kegiatan musrenbang kewilayahan (usulan ***bottom up***), BPBD Kabupaten Bandung tidak termasuk OPD yang mengusung dan mengakomodir usulan musrenbang kewilayahan.

Tabel 2.11
T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bandung Tahun 2025

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional pada dokumen RPJMN salah satunya Prioritas Ke-6 yaitu tentang "**Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**" diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 memuat 9 prioritas dimana prioritas nomor lima berbunyi "**Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Mendukung PembangunanBerkelanjutan dan Mengantisipasi Risiko Perubahan Iklim**", ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Prioritas ke-6 yaitu "**Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana**". Sedangkan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung masuk dalam misi ketiga yaitu "Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan". Untuk mendukung pencapaian misi ketiga Kabupaten Bandung serta tujuan dan sasaran BPBD, disusunlah empat strategi penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung yaitu:

1. Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur BPBD;
2. Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam kondisi siaga bencana dan tanggap darurat;
3. Memberdayakan seluruh sumber daya kebencanaan di Kabupaten Bandung dalam rangka mewujudkan *good governance*;
4. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2025

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.



BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung. Untuk itu, disusun visi dan misi BPBD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 mengacu kepada Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu :

"*Terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera)*".

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung adalah melaksanakan misi ke-3 (Ketiga) yaitu:

"*Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan*".

Untuk mendukung misi ini, aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen yang perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencana. Meninjau historis kebelakang, beberapa bencana cenderung tidak dapat dihindarkan dan mengganggu stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan terjadinya bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi perlu pula untuk diarahkan pada upaya adaptasi berupa rekayasa infrastruktur dan fasilitas public agar memiliki kepentingan terhadap bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran, kewenangan, tugas pokok dan fungsi (***Core business***) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.

5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2024 dalam rangka mendukung misi yang tertuang dalam RPJMD (Misi Ketiga), dalam program dan kegiatan di tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

1. Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

SASARAN

1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Tujuan BPBD Kabupaten Bandung merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari BPBD kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan misi Bupati Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Berikut turunan Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijelaskan melalui indikator (output) pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tabel Tujuan dan Sasaran BPBD

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	**Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah**	**Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai IKM Nilai SAKIP**			
2	**Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**		
3	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
4	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	daerah	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				SKPD	
5	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
6	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
7	**Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah**	**Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**		
8	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
9	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
10	**Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah**	**Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu**		
11	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
12	**Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah**	**Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**		
13	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
14	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
15	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
16	**Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah**	**Tesedianya Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**		
17	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
18	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
19	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
20	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
21	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
22	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
23	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
24	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
25	**Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah**	**Tersedianya Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
26	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
27	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
28	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
29	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
30	**Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah**	**Tersedianya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
31	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
32	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
33	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
34	**Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah**	**Tersedianya laporan BMD dalam Kondisi Baik**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**		
35	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
36	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
37	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	
38	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara	
39	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
40	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
41	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
42	**Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana**	**Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**			
43	**Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana**	**Meningkatnya Informasi rawan bencana yang diberikan kepada Warga Negara**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**		
44	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	
45	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	
46	**Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana**	**Meningkatnya Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam upaya mengurangi dampak bencana**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**		
47	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
48	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	
49	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Penyusunan Rencana Kontijensi			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	
50	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	
51	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	
52	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
53	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	
54	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	
55	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	
56	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	
57	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	
58	**Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana**	**Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara optimal**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		
59	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	
60	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	
61	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	
62	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	
63	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota			Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	
64	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
65	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	
66	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	
67	**Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana**	**Terlaksananya lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**Persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan**		
68	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	
69	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	
70	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	
71	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	
72	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
73	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	
74	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	
75	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
76	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	
77	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha alam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	
78	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	
79	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1(satu) tahun	

3.3 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya kegiatan BPBD Kabupaten Bandung adalah sebagai OPD pendukung dalam Misi 3 ***"Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan".*** Tahun Perencanaan 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung merumuskan **2 Program** dengan Pagu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** sebesar **Rp 12.381.396.401,00** dan **Program Penanggulangan Bencana** sebesar **Rp 5.877.241.000,00** serta melaksanakan **11 Kegiatan** dan **65 Sub Kegiatan** sebagaimana rincian dapat dilihat dari ***tabel T-C.33*** berikut.

Tabel 3.2

T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Bandung

Nama PD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
x	**xx**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai IKM Nilai SAKIP Persentase BMD Kondisi Baik**	BPBD Kabupaten Bandung	**1. 83,5; 2. 80,45; 3. 90**	**Rp 12.801.146.949,00**	APBD		**1. 76; 2. 80; 3. 100**	**12.381.396.401,00**
x	**xx**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	BPBD Kabupaten Bandung	**100 Persen**	**Rp 98.000.000,00**	APBD		**100 Persen**	**98.000.000,00**
x	**xx**	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kabupaten Bandung	6 Dokumen	Rp 10.000.000,00	APBD		6 Dokumen	10.000.000,00
x	**xx**	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	BPBD Kabupaten Bandung	2 Dokumen	Rp 40.000.000,00	APBD		2 Dokumen	40.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
x	xx	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	2 Dokumen	Rp 5.000.000,00	APBD		2 Dokumen	5.000.000,00
x	xx	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	5 Laporan	Rp 25.000.000,00	APBD		5 Laporan	25.000.000,00
x	xx	1	2,01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BPBD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 9.000.000,00	APBD		1 Dokumen	9.000.000,00
x	xx	1	2,01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	BPBD Kabupaten Bandung	20 Data	Rp 9.000.000,00	APBD		20 Data	9.000.000,00
x	**xx**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan**	BPBD Kabupaten	**100 Persen**	**Rp 8.968.866.949,00**	APBD			**9.054.616.401,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Bandung						
x	**xx**	1	2,02	**1**	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kabupaten Bandung	27 Orang/ Bulan	Rp 8.938.866.949,00	APBD		27 Orang/ Bulan	9.029.616.401,00
x	**xx**	1	2,02	**5**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	3 Laporan	Rp 30.000.000,00	APBD		3 Laporan	25.000.000,00
x	**xx**	**1**	**2**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu**	BPBD Kabupaten Bandung	**100 Persen**	**Rp 10.000.000,00**	APBD			**10.000.000,00**
x	xx	1	2,03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	5 Laporan	Rp 10.000.000,00	APBD		5 Laporan	10.000.000,00
x	**xx**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian**	BPBD Kabupaten Bandung	**100 Persen**	**Rp 60.000.000,00**	APBD			**60.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						yang tepat waktu							
x	xx	1	2.05	7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	BPBD Kabupaten Bandung	100 Paket	Rp 50.000.000,00	APBD		100 Paket	50.000.000,00
x	xx	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BPBD Kabupaten Bandung	82 Orang	Rp 5.000.000,00	APBD		1 Orang	5.000.000,00
x	xx	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPBD Kabupaten Bandung	82 Orang	Rp 5.000.000,00	APBD		1 Orang	5.000.000,00
x	**xx**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	BPBD Kabupaten Bandung	**100 Persen**	**Rp 605.000.000,00**	APBD			**610.000.000,00**
x	xx	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	15 Paket	Rp 20.000.000,00	APBD		15 Paket	20.000.000,00
x	xx	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	8 Paket	Rp 150.000.000,00	APBD		8 Paket	150.000.000,00
x	xx	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	BPBD Kabupaten	5 Paket	Rp 20.000.000,00	APBD		5 Paket	20.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Disediakan	Bandung						
x	xx	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	1 Paket	Rp 10.000.000,00	APBD		1 Paket	10.000.000,00
x	xx	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	6 Paket	Rp 20.000.000,00	APBD		6 Paket	20.000.000,00
x	xx	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	4 Dokumen	Rp 10.000.000,00	APBD		4 Dokumen	10.000.000,00
x	xx	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	APBD		1 Laporan	20.000.000,00
x	xx	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 360.000.000,00	APBD		1 Laporan	360.000.000,00
x	**xx**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	BPBD Kabupaten Bandung	**100 Persen**	**Rp 10.000.000,00**	APBD			**45.000.000,00**
x	xx	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan	BPBD Kabupate	0 Unit	Rp -	APBD		0 Unit	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n Bandung						
x	xx	2	2.08	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp -	APBD		0 Unit	35.000.000,00
x	xx	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp 10.000.000,00	APBD		0 Unit	10.000.000,00
x	xx	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp -	APBD		0 Unit	-
x	**xx**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	BPBD Kabupaten Bandung	**100 Persen**	**Rp 2.613.280.000,00**	APBD			**Rp 2.613.280.000,00**
x	xx	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 10.000.000,00	APBD		1 Laporan	Rp 10.000.000,00
x	xx	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	12 Laporan	Rp 144.000.000,00	APBD		12 Laporan	Rp 144.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
x	xx	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	12 Laporan	Rp 2.459.280.000,00	APBD		12 Laporan	Rp 2.459.280.000,00
x	**xx**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**	BPBD Kabupaten Bandung	**100 Persen**	**Rp 445.000.000,00**	APBD			**445.000.000,00**
x	xx	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	BPBD Kabupaten Bandung	1 Unit	Rp .	APBD		1 Unit	100.000.000,00
x	xx	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPBD Kabupaten Bandung	37 Unit	Rp 170.000.000,00	APBD		37 Unit	70.000.000,00
x	xx	2	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	BPBD Kabupaten Bandung	2 Unit	Rp -	APBD		0 Unit	-
x	xx	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	BPBD Kabupaten Bandung	1 Unit	Rp 10.000.000,00	APBD		1 Unit	10.000.000,00
x	xx	1	2.09	6	Pemeliharaan	Jumlah Peralatan	BPBD	2 Unit	Rp	APBD		2 Unit	64.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Peralatan dan Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Bandung		65.000.000,00				
x	xx	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp -	APBD		0 Unit	1.000.000,00
x	xx	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPBD Kabupaten Bandung	1 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD		1 Unit	200.000.000,00
1	**5**	**3**			**Program Penanggulangan Bencana**	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	Kabupaten Bandung	**100%**	**Rp 5.857.741.000,00**	APBD			5.877.241.000,00
1	**5**	**3**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	Kabupaten Bandung	**500000 Orang**	**Rp 410.000.000,00**	APBD			**410.000.000,00**
1	5	3	2.01	3	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	APBD		0 Dokumen	10.000.000,00
1	5	3	2.01	4	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	500000 Orang	Rp 400.000.000,00	APBD		500000 Orang	400.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun							
1	**5**	**3**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	Kabupaten Bandung	**250000 Orang**	**Rp 2.167.741.000,00**	APBD			**2.662.241.000,00**
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	- Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalamPencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Jumlah Kegiatan Stabilisasi Lereng/penahan tanah	Kabupaten Bandung	4 Kawasan	Rp 497.741.000,00	APBD		4 Kawasan	529.241.000,00
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kabupaten Bandung	0 Orang	Rp -	APBD		150 Orang	463.000.000,00
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Kabupaten	1 Dokume	Rp 200.000.000,00	APBD		1 Dokumen	200.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						yang Dilegalisasi	Bandung	n					
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kabupaten Bandung	200 Orang	Rp 500.000.000,00	APBD		200 Orang	250.000.000,00
1	5	3	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp 100.000.000,00	APBD		0 Dokumen	100.000.000,00
1	5	4	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kabupaten Bandung	0 Keluarga	Rp -	APBD		0 Keluarga	-
1	5	4	2.02	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kabupaten Bandung	0 Kegiatan	Rp 10.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	10.000.000,00
1	5	4	2.02	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	10.000.000,00
1	5	4	2.02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri	Kabupaten	3 Unit	Rp 300.000.000,00	APBD		3 Unit	300.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Kesiapsiagaan terhadap Bencana	bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Bandung						
1	5	4	2.02	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kabupaten Bandung	2 Kawasan	Rp 550.000.000,00	APBD		2 Kawasan	300.000.000,00
1	5	4	2.02	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 500.000.000,00	APBD		1 Laporan	500.000.000,00
1	**5**	**3**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban**	Kabupaten Bandung	**170000 Orang**	**Rp 1.655.000.000,00**	APBD			**1.655.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Bencana							
1	5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kabupaten Bandung	0 Laporan	Rp 10.000.000,00	APBD		0 Laporan	50.000.000,00
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	- SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat - Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	Kabupaten Bandung	- 1 Dokumen - 100%	Rp 350.000.000,00	APBD		- 1 Dokumen - 100%	350.000.000,00
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kabupaten Bandung	100000 Orang	Rp 165.000.000,00	APBD		100000 Orang	125.000.000,00
1	5	3	2.03	7	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp -	APBD		1 Dokumen	-
1	5	3	2.03	8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki	Kabupaten Bandung	50 Orang	Rp 150.000.000,00	APBD		50 Orang	150.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Kabupaten/Kota	kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis							
1	5	3	2.03	9	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabupaten Bandung	70000 Orang	Rp 960.000.000,00	APBD		70000 Orang	960.000.000,00
1	5	3	2.03	10	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	10.000.000,00
1	5	3	2.03	11	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Kabupaten Bandung	0 Laporan	Rp 10.000.000,00	APBD		1 Laporan	10.000.000,00
1	**5**	**3**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan**	Kabupaten Bandung	**100%**	**Rp 1.125.000.000,00**	APBD			**1.150.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan							
1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000,00
1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000,00
1	5	3	2.04	3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000,00
1	5	3	2.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000,00
1	5	3	2.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung	1 Laporan	10.000.000	APBD		1 Laporan	10.000.000,00
1	5	3	2.04	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Kabupaten Bandung	100 Orang	Rp 100.000.000,00	APBD		0 Orang	-
1	5	3	2.04	8	Bimbingan Teknis	Jumlah Aparatur	Kabupate	100	Rp	APBD		100 Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Pasca Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	n Bandung	Orang	95.000.000,00				95.000.000,00
1	5	3	2.04	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp -	APBD		1 Dokumen	100.000.000,00
1	5	3	2.04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kabupaten Bandung	5 Kegiatan	Rp 350.000.000,00	APBD		5 Kegiatan	350.000.000,00
1	5	3	2.04	1	Peningkatan partisipasi	Jumlah keterlibatan	Kabupate	1	Rp	APBD		1 Lembaga	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				1	masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	n Bandung	Lembaga	50.000.000,00				50.000.000,00
1	5	3	2.04	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	APBD		1 Laporan	50.000.000,00
1	5	3	2.04	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	Rp 325.000.000,00	APBD		2 Dokumen	325.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun							
					Jumlah Program 1+2				**Rp 18.667.877.949,00**				**18.258.637.401,00**

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada penyusunan perencaaan anggaran untuk penanggulangan bencana antara lain :

1. BPBD merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib berkenaan dengan Pelayanan dasar (SPM)
2. BPBD mempunyai target Capaian Kinerja Utama Kepala Daerah yaitu Menurunnya Indek Resiko bencana hal ini dengan menaikkan Indek kapasitas Daerah (IKD)
3. BPBD melaksanakan pencapaian Sdgs pada aspek Tatanan Sosial dan Lingkungan hidup

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD

Indikasi rencana program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, maka BPBD perlu melakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif, yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan PD BPBD dalam penyusunan rencana kerja

Prioritas pembangunan PD BPBD Kabupaten Bandung diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah khususnya dibidang penaggulangan bencana sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam pengananganan segera.

Hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM pelayanan publik dibidang Penanggulangan Bencana
2. Optimalisasi Pagu Anggaran Sektoral BPBD yang rasional dan proporsional
3. Peningkatan kualitas/kuantitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
4. Peningkatan kualitas Sistem Manajemen PRB yg didukung oleh RAD, PRB dan Rencana Kontijensi
5. Pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah, jenis bencana dan dampak bencana
6. Kemandiirian dan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha didalam upaya pencegahan/ kesiapsiagaan (Pra bencana) serta adaptasi terhadap bencana
7. Peningkatan kualitas koordinasi dan pelaksanaan program/kegiatan baik lintas lembaga/intansi/PD, lintas program/kegiatan maupun Anggaran
8. Terbitnya regulasi/kebijakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang SPM/SOP siklus penanggulangan kebencanaan (pra, saat dan pasca bencana).
9. Terdapatnya Kajian yang Komprehensif terhadap gambaran secara menyeluruhterhadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah/Kabupaten Bandung dalam bentuk tertulis dan Peta
10. Peningkatan Kualitas Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Bandung.

Prioritas Sebagaimana diatas dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Serta dalam rangka peningkatan Standar pelayanan minimal kepada masyarakat yang terdiri dari :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Dalam rangka menunjang program/kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tersebut, maka BPBD Kabupaten Bandung dalam pelaksanaanya harus ditunjang oleh anggaran program operasional dengan melakukan pemetaan ke Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. ***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

   Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

   1) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;*
   2) *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;*
   3) *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;*
   4) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.*

2. ***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

   Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

   1) *Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN;*
   2) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.*

3. ***Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***

   Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

   1) *Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.*

4. ***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***

   Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

   1. *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.*
   2. *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*

3. *Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*

5. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

1) *Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;*
2) *Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;*
3) *Penyediaan peralatan rumah tangga;*
4) *Penyediaan Bahan Logistik Kantor;*
5) *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;;*
6) *Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*
7) *Fasilitasi Kunjungan Tamu;*
8) *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.*

6. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

1) *Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;*
2) *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;*
3) *Pengadaan Mebel;*
4) *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*

7. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

1. *Penyediaan Jasa Surat Menyurat;*
2. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;*
3. *Penyediaan Jasa Pelayanan.*

8. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :

1) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;*
2) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;*
3) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar*
4) *Pemeliharaan Mebel;*
5) *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;*
6) *Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;*
7) *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.*

9. ***Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*** Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :
   1) *Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota;*
   2) *Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).*
10. ***Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***

    Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :
   1) *Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;*
   2) *Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;*
   3) *Penyusunan Rencana Kontijensi;*
   4) *Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;*
   5) *Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;*
   6) *Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam;*
   7) *Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota;*
   8) *Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;*
   9) *Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi BencanaKabupaten/Kota*;
   10) *Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;*
   11) *Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.*
11. ***Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***

    Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :
   1) *Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas;*
   2) *Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;*
   3) *Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;*
   4) *Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota;*
   5) *Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;*
   6) *Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;*
   7) *Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit;*
   8) *Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.*
12. ***Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***

    Kegiatan ini dimplementasikan kedalam ***Sub Kegiatan*** Sebagai berikut :
   1) *Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;*
   2) *Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;*

3) *Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;*
4) *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;*
5) *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;*
6) *Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;*
7) *Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota;*
8) *Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota;*
9) *Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;*
10) *Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;*
11) *Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota;*
12) *Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota.*

Penjelasan rencana kerja dan pendanaan BPBD Tahun Anggaran 2024 disampaikan pada **Tabel 4.1** :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Tahun 2025

Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
A.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	**x**	**xx**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai IKM Nilai SAKIP Persentase BMD Kondisi Baik**	BPBD Kabupaten Bandung	**1. 83,5; 2. 80,45: 3. 90**	**Rp 12.801.146.949,00**	APBD	
A.1		**x**	**xx**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	BPBD Kabupaten Bandung	**100 Persen**	**Rp 98.000.000,00**	APBD	
A.1.1		**x**	**xx**	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kabupaten Bandung	6 Dokumen	Rp 10.000.000,00	APBD	
A.1.2		**x**	**xx**	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	2 Dokumen	Rp 40.000.000,00	APBD	
A.1.3		**x**	**xx**	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	2 Dokumen	Rp 5.000.000,00	APBD	
A.1.4		**x**	**xx**	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	5 Laporan	Rp 25.000.000,00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
							Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
A.2		**x**	**xx**	1	2,01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BPBD Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 9.000.000,00	APBD	
A.2.1		**x**	**xx**	1	2,01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	BPBD Kabupaten Bandung	20 Data	Rp 9.000.000,00	APBD	
A.2.2		**x**	**xx**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	BPBD Kabupaten Bandung	**100 Persen**	**Rp 8.968.866.949,00**	APBD	
A.3		**x**	**xx**	1	2,02	**1**	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kabupaten Bandung	27 Orang/ Bulan	Rp 8.938.866.949,00	APBD	
A.3.1		**x**	**xx**	1	2,02	**5**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	3 Laporan	Rp 30.000.000,00	APBD	
A.4		**x**	**xx**	**1**	**2**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Barang**	BPBD Kabupaten Bandung	**100 Persen**	**Rp 10.000.000,00**	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
								Milik Daerah yang tepat waktu					
A.4.1		x	xx	1	2,03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	5 Laporan	Rp 10.000.000,00	APBD	
A.4.2		**x**	**xx**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**	BPBD Kabupaten Bandung	**100 Persen**	**Rp 60.000.000,00**	APBD	
A.4.3		x	xx	1	2.05	7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	BPBD Kabupaten Bandung	100 Paket	Rp 50.000.000,00	APBD	
A.5		x	xx	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BPBD Kabupaten Bandung	82 Orang	Rp 5.000.000,00	APBD	
A.5.1		x	xx	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPBD Kabupaten Bandung	82 Orang	Rp 5.000.000,00	APBD	
A.5.2		**x**	**xx**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	BPBD Kabupaten Bandung	**100 Persen**	**Rp 605.000.000,00**	APBD	
A.5.3		x	xx	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	BPBD Kabupaten Bandung	15 Paket	Rp 20.000.000,00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
								Disediakan					
A.5.4		x	xx	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	8 Paket	Rp 150.000.000,00	APBD	
A.5.5		x	xx	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	5 Paket	Rp 20.000.000,00	APBD	
A.5.6		x	xx	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	1 Paket	Rp 10.000.000,00	APBD	
A.5.7		x	xx	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	6 Paket	Rp 20.000.000,00	APBD	
A.5.8		x	xx	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	4 Dokumen	Rp 10.000.000,00	APBD	
A.6		x	xx	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	APBD	
A.6.1		x	xx	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 360.000.000,00	APBD	
A.6.2		**x**	**xx**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	BPBD Kabupaten Bandung	**100 Persen**	**Rp 10.000.000,00**	APBD	
A.6.3		x	xx	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	BPBD	0 Unit	Rp -	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
							Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kabupaten Bandung				
A.6.4		x	xx	2	2.08	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp -	APBD	
A.7		x	xx	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp 10.000.000,00	APBD	
A.7.1		x	xx	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp -	APBD	
A.7.2		**x**	**xx**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	BPBD Kabupaten Bandung	**100 Persen**	**Rp 2.613.280.000,00**	APBD	
A.7.3		x	xx	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 10.000.000,00	APBD	
A.8		x	xx	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	12 Laporan	Rp 144.000.000,00	APBD	
A.8.1		x	xx	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	12 Laporan	Rp 2.459.280.000,00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
A.8.2		**x**	**xx**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**	BPBD Kabupaten Bandung	**100 Persen**	**Rp 445.000.000,00**	APBD	
A.8.3		x	xx	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	BPBD Kabupaten Bandung	1 Unit	Rp .	APBD	
A.8.4		x	xx	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPBD Kabupaten Bandung	37 Unit	Rp 170.000.000,00	APBD	
A.8.5		x	xx	2	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	BPBD Kabupaten Bandung	2 Unit	Rp -	APBD	
A.8.6		x	xx	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	BPBD Kabupaten Bandung	1 Unit	Rp 10.000.000,00	APBD	
A.8.7		x	xx	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPBD Kabupaten Bandung	2 Unit	Rp 65.000.000,00	APBD	
		x	xx	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp -	APBD	
B.		x	xx	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor	BPBD	1 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
							Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bandung				
B.1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	**1**	**5**	**3**			**Program Penanggulangan Bencana**	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	Kabupaten Bandung	**100%**	**Rp 5.857.741.000,00**	APBD	
B.1.1		**1**	**5**	**3**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	Kabupaten Bandung	**500000 Orang**	**Rp 410.000.000,00**	APBD	
B.1.2		1	5	3	2.01	3	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	APBD	
B.2		1	5	3	2.01	4	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kabupaten Bandung	500000 Orang	Rp 400.000.000,00	APBD	
B.2.1		**1**	**5**	**3**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan**	Kabupaten Bandung	**250000 Orang**	**Rp 2.667.741.000,00**	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
							Terhadap Bencana	**dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**					
B.2.2		1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	- Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalamPencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Jumlah Kegiatan Stabilisasi Lereng/penahan tanah	Kabupaten Bandung	4 Kawasan	Rp 497.741.000,00	APBD	
B.2.3		1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kabupaten Bandung	0 Orang	Rp -	APBD	
B.2.4		1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 200.000.000,00	APBD	
B.2.5		1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kabupaten Bandung	200 Orang	Rp 500.000.000,00	APBD	
B.2.6		1	5	3	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp 100.000.000,00	APBD	
B.2.8		1	5	4	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kabupaten Bandung	0 Keluarga	Rp -	APBD	
B.2.9		1	5	4	2.02	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana	Kabupaten Bandung	0 Kegiatan	Rp 10.000.000,00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
								(per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani					
B.2.10		1	5	4	2.02	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	APBD	
B.2.11		1	5	4	2.02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kabupaten Bandung	3 Unit	Rp 300.000.000,00	APBD	
B.2.12		1	5	4	2.02	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kabupaten Bandung	2 Kawasan	Rp 550.000.000,00	APBD	
B.3		1	5	4	2.02	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis	Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 500.000.000,00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
								ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya					
B.3.1		**1**	**5**	**3**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Kabupaten Bandung	**170000 Orang**	**Rp 1.655.000.000,00**	APBD	
B.3.2		1	5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kabupaten Bandung	0 Laporan	Rp 10.000.000,00	APBD	
B.3.3		1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	- SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat - Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	Kabupaten Bandung	- 1 Dokumen - 100%	Rp 350.000.000,00	APBD	
B.3.4		1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kabupaten Bandung	100000 Orang	Rp 165.000.000,00	APBD	
B.3.5		1	5	3	2.03	7	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp -	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
							Bencana Kabupaten/Kota						
B.3.6		1	5	3	2.03	8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Kabupaten Bandung	50 Orang	Rp 150.000.000,00	APBD	
B.3.7		1	5	3	2.03	9	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabupaten Bandung	70000 Orang	Rp 960.000.000,00	APBD	
B.3.8		1	5	3	2.03	10	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	APBD	
B.4		1	5	3	2.03	11	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Kabupaten Bandung	0 Laporan	Rp 10.000.000,00	APBD	
B.4.1		**1**	**5**	**3**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan**	Kabupaten Bandung	**100%**	**Rp 1.125.000.000,00**	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
								penanggulangan kebencanaan					
B.4.2		1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	10.000.000	APBD	
B.4.3		1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	10.000.000	APBD	
B.4.4		1	5	3	2.04	3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	50.000.000	APBD	
B.4.5		1	5	3	2.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	100.000.000	APBD	
B.4.6		1	5	3	2.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung	1 Laporan	10.000.000	APBD	
B.4.7		1	5	3	2.04	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Kabupaten Bandung	100 Orang	Rp 100.000.000,00	APBD	
B.4.8		1	5	3	2.04	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam	Kabupaten Bandung	100 Orang	Rp 95.000.000,00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
								menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)					
B.4.9		1	5	3	2.04	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp -	APBD	
B.4.10		1	5	3	2.04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kabupaten Bandung	5 Kegiatan	Rp 350.000.000,00	APBD	
B.4.11		1	5	3	2.04	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain :	Kabupaten Bandung	1 Lembaga	Rp 50.000.000,00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
								lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal					
B.4.12		1	5	3	2.04	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	APBD	
B.4.13		1	5	3	2.04	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	Rp 325.000.000,00	APBD	
							Jumlah Program 1+2				**Rp 18.667.877.949,00**		

BAB V
PENUTUP

5.1 Penutup

Dengan adanya Rencana Kerja maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi diharapkan akan terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan skema OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung maupun OPD yang membidangi urusan lain. Rencana Kerja BPBD merupakan rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan tepat guna. Dengan mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (***stakeholders***) dalam menciptakan ***Good Governance*** sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi BPBD Kabupaten Bandung selama kurun waktu Satu tahun. Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Bandung juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Tahun 2025. Adapun fungsi dari Renja tahun anggaran 2025 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja pada tahun anggaran 2023 bagi BPBD, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bandung selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Bandung. RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BPBD Kabupaten Bandung.

Demikian Dokumen Rencana Kerja (Renja) BPBD tahun 2025 kami susun sebagai bahan acuan lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung



Drs. H. Uka Suska Puji Utama, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670914 199501 1 001

Disahkan Oleh:
Bupati Bandung,

Dr. H. Mochammad Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si.

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.		√	BPBD tidak melaksanakan Kegiatan MUSRENBANG sementara untuk Kegiatan berdasarkan Top Down dan Pokok Pikiran	
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		√	BPBD tidak melaksanakan Kegiatan MUSRENBANG sementara untuk Kegiatan berdasarkan Top Down dan Pokok Pikiran	
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	√			

Soreang, Juli 2024
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung

Drs. UKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670914 199501 1 001